

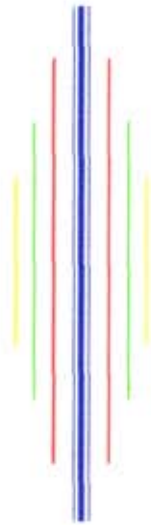


PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 19 TAHUN 2007**

Tentang

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN MELAWI**



**BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
TAHUN 2007**



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MELAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten;
- b. bahwa untuk pemungutan Retribusi Sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN MELAWI

BABI ...

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Melawi;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Melawi yang selanjutnya disingkat RSUD;
7. Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Melawi adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, dan atau tenaga lain yang ditunjuk oleh Direktur yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan, dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya;
8. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disingkat retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi;
9. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya untuk mencegah atau untuk menanggulangi resiko kematian atau cacat;
10. Akut atau Cyto adalah suatu keadaan pasien yang membutuhkan perawatan atau tindakan medik sesegera mungkin guna mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat fisik sementara atau permanen.
11. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik (dokter);
12. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan local atau tanpa pembiusan;
13. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk menunjang dalam penegakkan diagnosis dan terapi;
14. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
15. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

16. Wajib ...

Perundang-undangan, diwajibkan melakukan pembayaran retribusi;

17. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan kekurangan atas jumlah yang telah ditetapkan;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran atas retribusi terutang, karena kredit retribusi lebih besar dari retribusi terutang;
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan wajib retribusi terhadap SKRD atau Dokumen lain Yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi Kepada Bupati;
23. Jasa Pelayanan adalah jasa/ imbalan yang diterima oleh petugas medis, paramedis dan non medis atas pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya di Rumah Sakit.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
25. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat orang yang terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut Retribusi untuk setiap pelayanan kesehatan di RSUD.

Pasal 3

Objek Retribusi pelayanan Kesehatan di RSUD, meliputi :

- a. Rawat jalan dan Rawat Darurat;
- b. Rawat Inap dan rawat khusus;
- c. Tindakan Medik dan terapi non operatif;
- d. Tindakan Medik dan terapi operatif;
- e. Tindakan Medik gigi dan mulut;

f. Pemeriksaan ...

- f. Pemeriksaan Laboratorium;
- g. Pemeriksaan Radiology;
- h. Elektro Medik;
- i. Rehabilitasi Medik;
- j. Pelayanan Farmasi;
- k. Pemulasaran Jenazah;
- l. Mobil Ambulan dan mobil jenazah;
- m. Pelayanan Jasa Laundry;
- n. Piket pasien rawat inap;
- o. Surat Keterangan Medik;
- p. Administrasi Rawat Inap.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah setiap orang atau pribadi, yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum atau penjamin yang melakukan pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa untuk pelayanan kesehatan di Rumah Sakit didasarkan pada :

- a. jenis pelayanan yang diperoleh;
- b. jenis alat yang digunakan;
- c. tingkat kesulitan;
- d. kelas perawatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, didasarkan pada pertimbangan besarnya biaya penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan yang dijabarkan dalam komponen retribusi.
- (2) Komponen retribusi terdiri dari :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan dan atau;

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan atau kelas perawatan.
- (2) Besarnya tarif retribusi diperhitungkan berdasarkan jumlah nilai indeks komponen tarif retribusi dikalikan harga dasar hasil perhitungan unit kost per jenis pelayanan kesehatan ditambah biaya farmasi.

DAFTAR TARIF DAN PERSENTASE JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MELAWI

| No | Jenis Pelayanan | Tarif Restribusi | | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Keterangan |
|-----------------------------|--|------------------|--------------------|--------------|----------------|---|
| | | Dasar | (CYTO/AKUT) 30% | | | |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| AMBULANCE / MOBIL JENAZAH | | | | | | |
| 1 | Tarif Rp. 4.000/Km | Rp. 4.000,- | | Rp. 800,- | Rp. 3.200,- | Tarif Restribusi merupakan jumlah dari : 1. Jasa sarana 2. Jasa Pelayanan |
| KAMAR JENAZAH | | | | | | |
| 2 | Tarif Rp. 75.000,- / Hari | Rp. 75.000,- | | Rp. 15.000,- | Rp. 60.000,- | |
| VISUM | | | | | | |
| 3 | Visum Umum | Rp. 50.000,- | | Rp. 10.000,- | Rp. 40.000,- | |
| | Visum Jenazah | Rp. 150.000,- | | Rp. 30.000,- | Rp. 120.000,- | |
| RAWAT JALAN | | | | | | |
| 4 | Konsul Dr. Umum di Poli | Rp 11,000 | | Rp 2,200 | Rp 8,800 | Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran |
| | Konsul Dr. Umum di IGD | Rp 13,000 | | Rp 2,600 | Rp 10,400 | |
| 5 | Konsul Dr. Spesialis di Poli | Rp 18,000 | | Rp 3,600 | Rp 14,400 | |
| | Konsul Dr. Spesialis di IGD | Rp 25,000 | | Rp 5,000 | Rp 20,000 | |
| 6 | IGD | | | | | |
| | Tindakan Medik Non Operatif dan Terapi | | | | | |
| | a. Besar | Rp 39,000 | | Rp 7,800 | Rp 31,200 | |
| | b. Sedang | Rp 26,000 | | Rp 5,200 | Rp 20,800 | |
| | c. Kecil | Rp 15,000 | | Rp 3,000 | Rp 12,000 | |
| RAWAT INAP (Minimum 1 Hari) | | | | | | |
| 7 | ICU | Rp. 350.000 | | Rp. 70.000 | Rp. 280.000 | |
| | VIP | Rp. 175.000 | | Rp 35.000 | Rp. 140.000 | |
| | Kelas I | Rp 100.000 | | Rp 20.000 | Rp 80.000 | |
| | Kelas II | Rp 65.000 | | Rp 13.000 | Rp 52.000 | |
| | Kelas III | Rp 20.000 | | Rp 4.000 | Rp 16.000 | |
| | Incubator VIP | Rp 150.000 | | Rp 30.000 | Rp 120.000 | |
| | Incubator Kelas I | Rp 100.000 | | Rp 20.000 | Rp 80.000 | |
| | Incubator Kelas II | Rp 75.000 | | Rp 15.000 | Rp 60.000 | |
| | Incubator Kelas III | Rp 50.000 | | Rp 10.000 | Rp 40.000 | |

TINDAKAN

| a. Ciptaan Alhaman | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kelas III | Rp. 4,000,000 | Rp. 1,200,000 | Rp. 8,00,000 | Rp. 3,200,000 |
| Kelas II | Rp. 4,800,000 | Rp. 1,440,000 | Rp. 980,000 | Rp. 3,840,000 |
| Kelas I | Rp. 5,500,000 | Rp. 1,650,000 | Rp. 1,100,000 | Rp. 4,400,000 |
| Kelas VIP | Rp. 6,500,000 | Rp. 1,950,000 | Rp. 1,300,000 | Rp. 5,200,000 |
| b. Besar | | | | |
| Kelas III | Rp 1,912,500 | Rp 2,486,250 | Rp 382,500 | Rp 1,530,000 |
| Kelas II | Rp 2,550,000 | Rp 3,315,000 | Rp 510,000 | Rp 2,040,000 |
| Kelas I | Rp 3,000,000 | Rp 3,900,000 | Rp 600,000 | Rp 2,400,000 |
| Kelas VIP | Rp. 3,500,000 | Rp. 1,050,000 | Rp. 700,000 | Rp. 2,800,000 |
| c. Sedang | | | | |
| 8 Kelas III | Rp 1,500,000 | Rp 1,950,000 | Rp 300,000 | Rp. 1,200,000 |
| Kelas II | Rp 1,700,000 | Rp 2,210,000 | Rp 340,000 | Rp. 1,360,000 |
| Kelas I | Rp 2,000,000 | Rp 600,000 | Rp 400,000 | Rp. 1,600,000 |
| Kelas VIP | Rp. 2,400,000 | Rp. 720,000 | Rp. 480,000 | Rp. 1,920,000 |
| d. Kecil | | | | |
| Kelas III | Rp 750,000 | Rp 225,000 | Rp 150,000 | Rp 600,000 |
| Kelas II | Rp 850,000 | Rp 255,000 | Rp 170,000 | Rp 680,000 |
| Kelas I | Rp 1,000,000 | Rp 300,000 | Rp 200,000 | Rp 800,000 |
| Kelas VIP | Rp. 1,300,000 | Rp. 390,000 | Rp. 260,000 | Rp. 1,040,000 |

**DAFTAR TARIF PERSENTASE JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN
RSUD MELAWI**

| No | Pelayanan | Kelas I | | |
|----|-----------|---------|-------------|----------------|
| | | Tarif | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

LABORATORIUM

| | | | | |
|----|-----------------------|-----------|----------|-----------|
| 1 | Hb | Rp 6,600 | Rp 1,320 | Rp 5,280 |
| 2 | Eritrosit | Rp 9,900 | Rp 1,980 | Rp 7,920 |
| 3 | Leukosit | Rp 9,900 | Rp 1,980 | Rp 7,920 |
| 4 | Trombosit | Rp 9,900 | Rp 1,980 | Rp 7,920 |
| 5 | Masa Pendarahan/BT | Rp 5,500 | Rp 1,100 | Rp 4,400 |
| 6 | Masa Pembekuan/CT | Rp 358 | Rp 77 | Rp 308 |
| 7 | PH | Rp 4,400 | Rp 880 | Rp 3,520 |
| 8 | Berat Jenis | Rp 4,400 | Rp 880 | Rp 3,520 |
| 9 | Protein | Rp 4,950 | Rp 990 | Rp 3,960 |
| 10 | Reduksi Glukosa | Rp 4,950 | Rp 990 | Rp 3,960 |
| 11 | Urobilinogen | Rp 4,950 | Rp 990 | Rp 3,960 |
| 12 | Urobilin | Rp 4,950 | Rp 990 | Rp 3,960 |
| 13 | Aseton | Rp 6,600 | Rp 1,320 | Rp 5,280 |
| 14 | Esbach | Rp 6,600 | Rp 1,320 | Rp 5,280 |
| 15 | Darah Samar | Rp 6,600 | Rp 1,320 | Rp 5,280 |
| 16 | Sedimen | Rp 4,950 | Rp 990 | Rp 3,960 |
| 17 | Proten Bence Jones | Rp 6,600 | Rp 1,320 | Rp 5,280 |
| 18 | Laju Endap Darah | Rp 6,600 | Rp 1,320 | Rp 5,280 |
| 19 | Hematokrit | Rp 13,200 | Rp 2,640 | Rp 10,560 |
| 20 | Retikulosit | Rp 8,800 | Rp 1,760 | Rp 7,040 |
| 21 | Sel LE | Rp 8,800 | Rp 1,760 | Rp 7,040 |
| 22 | Filaria | Rp 8,800 | Rp 1,760 | Rp 7,040 |
| 23 | BTA | Rp 8,800 | Rp 1,760 | Rp 7,040 |
| 24 | Nessleria Slide | Rp 8,800 | Rp 1,760 | Rp 7,040 |
| 25 | Dipteria Slide | Rp 8,800 | Rp 1,760 | Rp 7,040 |
| 26 | Mikro Organisme Slide | Rp 8,800 | Rp 1,760 | Rp 7,040 |
| 27 | Jumlah Transundat | Rp 8,800 | Rp 1,760 | Rp 7,040 |
| 28 | Pach Test | Rp 8,800 | Rp 1,760 | Rp 7,040 |

| | | | | |
|----|----------------------------------|------------|------------|------------|
| 29 | Hitung Jenis Leukosit/Diff Count | Rp. 8,800 | Rp. 1,760 | Rp. 7,040 |
| 30 | Set Liput | Rp. 8,800 | Rp. 1,760 | Rp. 7,040 |
| 31 | Wabara | Rp. 8,800 | Rp. 1,760 | Rp. 7,040 |
| 32 | Golongan Darah | Rp. 8,800 | Rp. 1,760 | Rp. 7,040 |
| 33 | Glukosa Darah | Rp. 23,100 | Rp. 4,620 | Rp. 18,480 |
| 34 | Akalis Pospatase | Rp. 34,100 | Rp. 6,820 | Rp. 27,280 |
| 35 | Urine Lengkap | Rp. 15,000 | Rp. 3,000 | Rp. 12,000 |
| 36 | Test Kehamilan | Rp. 15,000 | Rp. 3,000 | Rp. 12,000 |
| 37 | Pemeriksaan Feaces | Rp. 15,000 | Rp. 3,000 | Rp. 12,000 |
| 38 | Hematologi Lengkap (Advia) | Rp. 45,000 | Rp. 9,000 | Rp. 36,000 |
| 39 | LDH | Rp. 65,000 | Rp. 13,000 | Rp. 52,000 |
| 40 | Protein Total | Rp. 25,000 | Rp. 5,000 | Rp. 20,000 |
| 41 | Albumin | Rp. 20,000 | Rp. 4,000 | Rp. 16,000 |
| 42 | Globulin | Rp. 20,000 | Rp. 4,000 | Rp. 16,000 |
| 43 | Asam Pospatase | Rp. 34,100 | Rp. 6,820 | Rp. 27,280 |
| 44 | Bilirubin | Rp. 34,100 | Rp. 6,820 | Rp. 27,280 |
| 45 | Asam Urat Darah | Rp. 32,450 | Rp. 6,463 | Rp. 25,960 |
| 46 | Kreatinin Darah | Rp. 32,450 | Rp. 6,490 | Rp. 25,960 |
| 47 | Kolesterol | Rp. 32,450 | Rp. 6,490 | Rp. 25,960 |
| 48 | Ureum | Rp. 32,450 | Rp. 6,490 | Rp. 25,960 |
| 49 | SGOT | Rp. 32,450 | Rp. 6,490 | Rp. 25,960 |
| 50 | SGPT | Rp. 32,450 | Rp. 6,450 | Rp. 25,960 |
| 51 | Gamma GT | Rp. 36,850 | Rp. 7,370 | Rp. 29,480 |
| 52 | Trigliserida | Rp. 35,200 | Rp. 7,040 | Rp. 28,160 |
| 53 | Widal | Rp. 56,925 | Rp. 11,385 | Rp. 45,540 |
| 54 | HDL | Rp. 33,825 | Rp. 6,765 | Rp. 27,060 |
| 55 | LDL | Rp. 18,425 | Rp. 3,685 | Rp. 14,740 |
| 56 | Total Lipid | Rp. 55,000 | Rp. 11,000 | Rp. 44,000 |
| 57 | HBsAg | Rp. 40,425 | Rp. 8,085 | Rp. 32,340 |
| 58 | Anti HBs | Rp. 40,425 | Rp. 8,085 | Rp. 32,340 |

TINDAKAN MEDIK DIRUANGAN

| | | | | |
|---|-----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1 | Partus Normal | Rp. 800,000 | Rp. 160,000 | Rp. * 640,000 |
| 2 | Partus Abnormal | Rp. 1,200,000 | Rp. 240,000 | Rp. 960,000 |
| 3 | Curetase | Rp. 1,200,000 | Rp. 240,000 | Rp. 960,000 |
| 4 | Tubektomy | Rp. 1,200,000 | Rp. 240,000 | Rp. 960,000 |
| 5 | Anuscopy | Rp. 80,000 | Rp. 16,000 | Rp. 64,000 |
| 6 | Pungsi Acites | Rp. 500,000 | Rp. 100,000 | Rp. 400,000 |
| 7 | Pungsi Pleurea | Rp. 500,000 | Rp. 100,000 | Rp. 400,000 |

PEMERIKSAAN PENUNJANG / ELEKTROMEDIK

| | | | | |
|---|----------------------------|-------------|------------|-------------|
| 1 | E C G | Rp. 50,000 | Rp. 10,000 | Rp. 40,000 |
| 2 | E E G | Rp. 50,000 | Rp. 10,000 | Rp. 40,000 |
| 3 | USG | Rp. 100,000 | Rp. 20,000 | Rp. 80,000 |
| 4 | USG Doppler | Rp. 250,000 | Rp. 50,000 | Rp. 200,000 |
| 5 | Foto Thorax | Rp. 50,000 | Rp. 10,000 | Rp. 40,000 |
| 6 | Foto Abdomen | Rp. 50,000 | Rp. 10,000 | Rp. 40,000 |
| 7 | Foto Abdomen 2 Resisi | Rp. 90,000 | Rp. 18,000 | Rp. 72,000 |
| 8 | Foto Abdomen 3 Resisi | Rp. 120,000 | Rp. 24,000 | Rp. 96,000 |
| 9 | Foto Rontgen 1 Posisi Lain | Rp. 50,000 | Rp. 10,000 | Rp. 40,000 |

| No | Pelayanan | Kelas II | | |
|---------------------|--------------------|-----------|-------------|----------------|
| | | Tarif | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan |
| LABORATORIUM | | | | |
| 1 | Hb | Rp. 5,500 | Rp. 1,100 | Rp. 4,400 |
| 2 | Eritrosit | Rp. 8,800 | Rp. 1,760 | Rp. 7,040 |
| 3 | Leukosit | Rp. 8,800 | Rp. 1,760 | Rp. 7,040 |
| 4 | Trombosit | Rp. 8,800 | Rp. 1,760 | Rp. 7,040 |
| 5 | Masa Pendarahan/BT | Rp. 4,400 | Rp. 880 | Rp. 3,520 |
| 6 | Masa Pembekuan/CT | Rp. 1,980 | Rp. 396 | Rp. 1,584 |
| 7 | PH | Rp. 3,300 | Rp. 660 | Rp. 2,640 |
| 8 | Berat Jenis | Rp. 3,300 | Rp. 660 | Rp. 2,640 |
| 9 | Protein | Rp. 3,850 | Rp. 770 | Rp. 3,080 |
| | | Rp. 3,850 | Rp. 770 | Rp. 3,080 |

| | | | | |
|---------------------|----------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| 7 | Foto Abdomen 2 Riasal | Rp. 80,000 | Rp. 16,000 | Rp. 64,000 |
| 8 | Foto Abdomen 3 Riasal | Rp. 110,000 | Rp. 22,000 | Rp. 88,000 |
| 9 | Foto Rontgen 1 Posisi Lain | Rp. 40,000 | Rp. 8,000 | Rp. 32,000 |
| No | Pelayanan | Kelas III | | |
| | | Tarif | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| LABORATORIUM | | | | |
| 1 | Hb | Rp. 3,850 | Rp. 770 | Rp. 3,080 |
| 2 | Eritrosit | Rp. 7,150 | Rp. 1,430 | Rp. 5,720 |
| 3 | Leukosit | Rp. 7,150 | Rp. 1,430 | Rp. 5,720 |
| 4 | Trombosit | Rp. 7,150 | Rp. 1,430 | Rp. 5,720 |
| 5 | Masa Pendarahan/BT | Rp. 2,750 | Rp. 550 | Rp. 2,200 |
| 6 | Masa Pembekuan/CT | Rp. 990 | Rp. 198 | Rp. 792 |
| 7 | PH | Rp. 1,650 | Rp. 330 | Rp. 1,320 |
| 8 | Berat Jenis | Rp. 1,650 | Rp. 330 | Rp. 1,320 |
| 9 | Protein | Rp. 2,200 | Rp. 440 | Rp. 1,760 |
| 10 | Reduksi Glukosa | Rp. 2,200 | Rp. 440 | Rp. 1,760 |
| 11 | Urobilinogen | Rp. 2,200 | Rp. 440 | Rp. 1,760 |
| 12 | Urobilin | Rp. 2,200 | Rp. 440 | Rp. 1,760 |
| 13 | Aseton | Rp. 3,850 | Rp. 770 | Rp. 3,080 |
| 14 | Esbach | Rp. 3,850 | Rp. 770 | Rp. 3,080 |
| 15 | Darah Samar | Rp. 3,850 | Rp. 770 | Rp. 3,080 |
| 16 | Sedimen | Rp. 2,200 | Rp. 440 | Rp. 1,760 |
| 17 | Proten Bence Jones | Rp. 3,850 | Rp. 770 | Rp. 3,080 |
| 18 | Laju Endap Darah | Rp. 3,850 | Rp. 770 | Rp. 3,080 |
| 19 | Hematokrit | Rp. 10,450 | Rp. 2,090 | Rp. 8,360 |
| 20 | Retikulosit | Rp. 6,050 | Rp. 1,210 | Rp. 4,840 |
| 21 | Sel LE | Rp. 6,050 | Rp. 1,210 | Rp. 4,840 |
| 22 | Filaria | Rp. 6,050 | Rp. 1,210 | Rp. 4,840 |
| 23 | BTA | Rp. 6,050 | Rp. 1,210 | Rp. 4,840 |
| 24 | Nessleria Slide | Rp. 6,050 | Rp. 1,210 | Rp. 4,840 |
| 25 | Dipteria Slide | Rp. 6,050 | Rp. 1,210 | Rp. 4,840 |
| 26 | Mikro Organisme Slide | Rp. 6,050 | Rp. 1,210 | Rp. 4,840 |
| 27 | Jumlah Transudat | Rp. 6,050 | Rp. 1,210 | Rp. 4,840 |
| 28 | Pach Test | Rp. 6,050 | Rp. 1,210 | Rp. 4,840 |
| 29 | Hitung Jenis Leukosit/Diff Count | Rp. 6,050 | Rp. 1,210 | Rp. 4,840 |
| 30 | Sel Liqour | Rp. 6,050 | Rp. 1,210 | Rp. 4,840 |
| 31 | Malaria | Rp. 6,050 | Rp. 1,210 | Rp. 4,840 |
| 32 | Golongan Darah | Rp. 6,050 | Rp. 1,210 | Rp. 4,840 |
| 33 | Glukosa Darah | Rp. 20,350 | Rp. 4,070 | Rp. 16,280 |
| 34 | Alkalie Pospatase | Rp. 31,350 | Rp. 6,270 | Rp. 25,080 |
| 35 | Urine Lengkap | Rp. 12,000 | Rp. 2,400 | Rp. 9,600 |
| 36 | Test Kehamilan | Rp. 12,000 | Rp. 2,400 | Rp. 9,600 |
| 37 | Pemeriksaan Feaces | Rp. 12,000 | Rp. 2,400 | Rp. 9,600 |
| 38 | Hematologi Lengkap (Advia) | Rp. 40,000 | Rp. 8,000 | Rp. 32,000 |
| 39 | LDH | Rp. 60,000 | Rp. 12,000 | Rp. 48,000 |
| 40 | Protein Total | Rp. 20,000 | Rp. 4,000 | Rp. 16,000 |
| 41 | Albumin | Rp. 16,000 | Rp. 3,200 | Rp. 12,800 |
| 42 | Globulin | Rp. 16,000 | Rp. 3,200 | Rp. 12,800 |
| 43 | Asam Pospatase | Rp. 31,350 | Rp. 6,270 | Rp. 25,080 |
| 44 | Bilirubin | Rp. 31,350 | Rp. 6,270 | Rp. 25,080 |
| 45 | Asam Urat Darah | Rp. 28,325 | Rp. 5,665 | Rp. 22,660 |
| 46 | Kreatinin Darah | Rp. 28,325 | Rp. 5,665 | Rp. 22,660 |
| 47 | Kolesterol | Rp. 28,325 | Rp. 5,665 | Rp. 22,660 |
| 48 | Ureum | Rp. 28,325 | Rp. 5,665 | Rp. 22,660 |
| 49 | SGPT | Rp. 28,325 | Rp. 5,665 | Rp. 22,660 |
| 50 | SGOT | Rp. 28,325 | Rp. 5,665 | Rp. 22,660 |
| 51 | Gamma GT | Rp. 32,725 | Rp. 6,545 | Rp. 26,180 |
| 52 | Trigliserida | Rp. 31,075 | Rp. 6,215 | Rp. 24,860 |
| 53 | Widal | Rp. 50,739 | Rp. 10,148 | Rp. 40,591 |
| 54 | HDL | Rp. 27,639 | Rp. 5,528 | Rp. 22,111 |

| | | | | |
|---|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 55 | LDL | Rp. 12,239 | Rp. 2,448 | Rp. 9,791 |
| 56 | Total Lipid | Rp. 50,000 | Rp. 10,000 | Rp. 40,000 |
| 57 | HBsAg | Rp. 34,239 | Rp. 6,848 | Rp. 27,391 |
| 58 | Anti HBs | Rp. 34,239 | Rp. 6,848 | Rp. 27,391 |
| TINDAKAN MEDIK DIRUANGAN | | | | |
| 1 | Partus Normal | Rp. 400,000 | Rp. 80,000 | Rp. 320,000 |
| 2 | Partus Abnormal | Rp. 700,000 | Rp. 140,000 | Rp. 560,000 |
| 3 | Curetase | Rp. 700,000 | Rp. 140,000 | Rp. 560,000 |
| 4 | Tubektomy | Rp. 700,000 | Rp. 140,000 | Rp. 560,000 |
| 5 | Anuscopy | Rp. 40,000 | Rp. 8,000 | Rp. 32,000 |
| 6 | Pungsi Acites | Rp. 250,000 | Rp. 50,000 | Rp. 200,000 |
| 7 | Pungsi Pleurea | Rp. 250,000 | Rp. 50,000 | Rp. 200,000 |
| PEMERIKSAAN PENUNJANG / ELEKTROMEDIK | | | | |
| 1 | E C G | Rp. 30,000 | Rp. 6,000 | Rp. 24,000 |
| 2 | E E G | Rp. 30,000 | Rp. 6,000 | Rp. 24,000 |
| 3 | USG | Rp. 60,000 | Rp. 12,000 | Rp. 48,000 |
| 4 | USG Doppler | Rp. 150,000 | Rp. 30,000 | Rp. 120,000 |
| 5 | Foto Thorax | Rp. 36,000 | Rp. 7,200 | Rp. 28,800 |
| 6 | Foto Abdomen | Rp. 36,000 | Rp. 7,200 | Rp. 28,800 |
| 7 | Foto Abdomen 2 Resisi | Rp. 70,000 | Rp. 14,000 | Rp. 56,000 |
| 8 | Foto Abdomen 3 Resisi | Rp. 100,000 | Rp. 20,000 | Rp. 80,000 |
| 9 | Foto Rontgen 1 Posisi Lain | Rp. 36,000 | Rp. 7,200 | Rp. 28,800 |

BAB VII

CARA PERHITUNGAN DAN PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 10

Besarnya retribusi yang dihitung dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

Pasal 11

Semua hasil retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi dimaksud pada Pasal 9 ayat (2), disetor ke kas daerah.

BAB VIII

PENGEMBALIAN JASA PELAYANAN

Pasal 12

Jasa pelayanan yang telah disetor ke kas daerah sebagaimana dimaksud pasal 11 dikembalikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Melawi yang besarnya sesuai dengan Jasa Pelayanan yang dimaksud pada pasal 9 Ayat (2).

Pasal 13

Tindakan medis dan atau perawatan yang bersifat akut untuk alokasi pengembalian Jasa Pelayanan sebesar 30 % di kembalikan seluruhnya ke Rumah Sakit Umum Daerah Melawi.

| | | | | |
|---|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 55 | LDL | Rp. 12,239 | Rp. 2,448 | Rp. 9,791 |
| 56 | Total Lipid | Rp. 50,000 | Rp. 10,000 | Rp. 40,000 |
| 57 | HBsAg | Rp. 34,239 | Rp. 6,848 | Rp. 27,391 |
| 58 | Anti HBs | Rp. 34,239 | Rp. 6,848 | Rp. 27,391 |
| TINDAKAN MEDIK DIRUANGAN | | | | |
| 1 | Partus Normal | Rp. 400,000 | Rp. 80,000 | Rp. 320,000 |
| 2 | Partus Abnormal | Rp. 700,000 | Rp. 140,000 | Rp. 560,000 |
| 3 | Curetase | Rp. 700,000 | Rp. 140,000 | Rp. 560,000 |
| 4 | Tubektomy | Rp. 700,000 | Rp. 140,000 | Rp. 560,000 |
| 5 | Anuscopy | Rp. 40,000 | Rp. 8,000 | Rp. 32,000 |
| 6 | Pungsi Acites | Rp. 250,000 | Rp. 50,000 | Rp. 200,000 |
| 7 | Pungsi Pleurea | Rp. 250,000 | Rp. 50,000 | Rp. 200,000 |
| PEMERIKSAAN PENUNJANG / ELEKTROMEDIK | | | | |
| 1 | E C G | Rp. 30,000 | Rp. 6,000 | Rp. 24,000 |
| 2 | E E G | Rp. 30,000 | Rp. 6,000 | Rp. 24,000 |
| 3 | USG | Rp. 60,000 | Rp. 12,000 | Rp. 48,000 |
| 4 | USG Doppler | Rp. 150,000 | Rp. 30,000 | Rp. 120,000 |
| 5 | Foto Thorax | Rp. 36,000 | Rp. 7,200 | Rp. 28,800 |
| 6 | Foto Abdomen | Rp. 36,000 | Rp. 7,200 | Rp. 28,800 |
| 7 | Foto Abdomen 2 Resisi | Rp. 70,000 | Rp. 14,000 | Rp. 56,000 |
| 8 | Foto Abdomen 3 Resisi | Rp. 100,000 | Rp. 20,000 | Rp. 80,000 |
| 9 | Foto Rontgen 1 Posisi Lain | Rp. 36,000 | Rp. 7,200 | Rp. 28,800 |

BAB VII

CARA PERHITUNGAN DAN PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 10

Besarnya retribusi yang dihitung dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

Pasal 11

Semua hasil retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi dimaksud pada Pasal 9 ayat (2), disetor ke kas daerah.

BAB VIII

PENGEMBALIAN JASA PELAYANAN

Pasal 12

Jasa pelayanan yang telah disetor ke kas daerah sebagaimana dimaksud pasal 11 dikembalikan pada Rumah Sakit Umum Daerah Melawi yang besarnya sesuai dengan Jasa Pelayanan yang dimaksud pada pasal 9 Ayat (2).

Pasal 13

Tindakan medis dan atau perawatan yang bersifat akut untuk alokasi pengembalian Jasa Pelayanan sebesar 30 % di kembalikan seluruhnya ke Rumah Sakit Umum Daerah Melawi.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Retribusi di pungut di wilayah Kabupaten Melawi.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di tempat Pelayanan Kesehatan.

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 16

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan atau diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang, dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari, sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, SPRD dan surat keputusan keberatan, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan Keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB, atau dokumen lain yang dipersamakan, kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan, paling lama 1 (satu) bulan, sejak SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau dokumen lainnya yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa batas waktu dimaksud, tidak dapat dipenuhi diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan Keberatan tidak menunda pembayaran atau penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak seluruhnya atau sebagian.
- (3) Apabila jangka waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka keberatan dianggap dikabulkan.

BAB XVI

KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas Kelebihan Pembayaran, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, telah dilampaui, Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan, dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan.
- (4) Apabila Wajib retribusi yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan bayar retribusi, mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk terlebih dahulu melunasi hutang retribusi tersebut;

(5) Pengembalian...

- (5) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, sejak diterbitkannya SKRDLB, dan apabila jangka waktu tersebut terlampaui, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus), untuk tiap bulan keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, diajukan secara tertulis kepada bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan dengan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan Pembayaran retribusi tersebut, diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan, dan pemindah bukuan ini berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan peenghapusan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, atau keringanan retribusi sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila, diterbitkan surat teguran atau ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan perkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan terakhir menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku atau catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti atau dilarang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

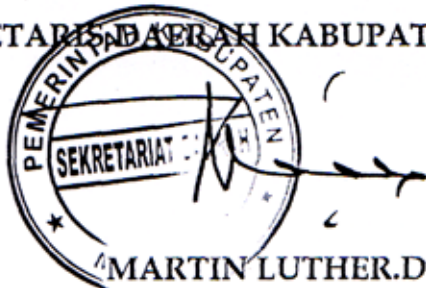
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 2 Oktober 2007



Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 3 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 NOMOR 19

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 19 TAHUN 2007**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN MELAWI**

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat, maka Kabupaten Melawi telah diakui keberadaannya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah telah diatur bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan, merupakan Restribusi Daerah, dan sekaligus Merupakan Kewenangan Daerah Kabupaten.

Memperhatikan Kabupaten Melawi sebagai Kabupaten yang baru terbentuk, maka perlu pengaturan terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi, sekaligus pengaturan terhadap Pemungutan/Penarikan Retribusi Pelayanan Kesehatan dimaksud, oleh karenanya perlu diatur melalui Peraturan Daerah, dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Penjelasan Pasal demi Pasal tidak Perlu karena dianggap sudah cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 45